

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Binjai Melalui Penguatan Peran Kecamatan

Hot Maringan Samosir ^{1*}

¹ Sub Bagian Keuangan dan Program, Kantor Kecamatan Binjai Selatan, Pemerintah Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara

Email: ^{1*} hotmarngnsh@gmail.com

Abstrak

Peningkatan kualitas pembangunan daerah menuntut penerapan perencanaan yang partisipatif agar kebijakan yang disusun selaras dengan kebutuhan masyarakat. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di tingkat kecamatan masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kota Binjai, tantangan yang dihadapi, serta strategi penguatan yang dapat dilakukan untuk menciptakan perencanaan yang inklusif dan responsif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui analisis isi terhadap dokumen kebijakan daerah, yaitu RPJPD, RPJMD, RENSTRA, dan RENJA tingkat kecamatan. Analisis dilakukan melalui tahapan koding terbuka, pembentukan kategori, dan interpretasi mendalam, dilanjutkan dengan triangulasi antar dokumen untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masih didominasi pada tahap konsultasi, dengan keterbatasan pada akses informasi, kapasitas masyarakat, integrasi forum formal dan informal, serta kualitas fasilitasi dialog oleh aparatur kecamatan. Strategi penguatan diperlukan melalui peningkatan kapasitas warga, digitalisasi kanal partisipasi, penguatan forum Musrenbang, dan model tata kelola kolaboratif. Temuan ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna merupakan prasyarat bagi pembangunan kota yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan, Kecamatan

Abstract

Improving the quality of regional development requires the implementation of participatory planning so that policies are formulated in line with community needs. However, various studies indicate that community participation at the sub-district level is still symbolic and does not fully influence the development decision-making process. This study aims to analyze the state of community participation in development planning in Binjai City, the challenges faced, and strengthening strategies that can be implemented to create inclusive and responsive planning. A descriptive qualitative approach was used through content analysis of regional policy documents, namely the RPJPD (Regional Medium-Term Development Plan), RPJMD (Regional Medium-Term Development Plan), RENSTRA (Regional Strategic Plan), and RENJA (Regional Strategic Plan) at the sub-district level. The analysis was conducted through stages of open coding, category formation, and in-depth interpretation, followed by triangulation between documents to ensure data validity. The results show that the level of participation is still dominated by the consultation stage, with limitations in information access, community capacity, integration of formal and informal forums, and the quality of dialogue facilitation by sub-district officials. Strengthening strategies are needed through increasing community capacity, digitizing participation channels, strengthening the Musrenbang forum, and a collaborative governance model. These findings confirm that meaningful community participation is a prerequisite for advanced, prosperous, and sustainable urban development.

Keywords: Community Participation, Development Planning, Sub-district

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan instrumen penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Saat ini, pendekatan pembangunan yang partisipatif semakin menjadi tuntutan, mengingat proses perencanaan tidak lagi dapat didominasi oleh pendekatan top-down, melainkan harus memberikan ruang bagi masyarakat sebagai subjek dalam setiap tahapan perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan masyarakat di tingkat kecamatan menjadi krusial karena pada level inilah kebutuhan lokal teridentifikasi secara nyata, sehingga partisipasi yang bermakna dapat meningkatkan legitimasi sosial, efektivitas, dan keberlanjutan program pembangunan.

Namun berbagai studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam praktik pembangunan daerah masih menghadapi tantangan. Kehadiran masyarakat dalam forum-forum perencanaan seperti Musrenbang cenderung rendah, dan jika pun hadir, kontribusi ide maupun keterlibatan dalam pengawasan belum optimal (Taurista & Choiriyah, 2024). Partisipasi sering berhenti pada simbolisme (tokenism) dan belum menyentuh ruang pengambilan keputusan substantif. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kapasitas masyarakat, tingkat pendidikan, komunikasi pemerintah-warga, dan kualitas kepemimpinan lokal. Meskipun kerangka regulasi nasional seperti UU No. 25 Tahun 2004 telah mengatur mekanisme partisipatif, implementasi di daerah masih menghadirkan kesenjangan antara norma dan praktik (Putra, 2023).

Konteks Kota Binjai menunjukkan dinamika yang serupa. Pemerintah Kota Binjai melalui Musrenbang RKPD menyatakan komitmen terhadap perencanaan yang aspiratif dan transparan (ANTARA Sumut, 2024), namun masih ditemukan kendala seperti keterbatasan akses informasi, minimnya kapasitas warga, serta belum optimalnya mekanisme tindak lanjut usulan masyarakat. Tantangan ini perlu menjadi perhatian karena pembangunan kota yang inklusif merupakan prasyarat bagi terwujudnya tata kelola cerdas dan pemerintahan yang akuntabel. Di tingkat kecamatan, isu-isu yang sering muncul meliputi representasi kelompok rentan (perempuan, pemuda, masyarakat miskin), literasi masyarakat tentang mekanisme perencanaan, transparansi perumusan usulan, serta sinkronisasi kebijakan antar instansi.

Penelitian terdahulu ikut menegaskan urgensi masalah ini. Studi Adhanani (2019) menunjukkan bahwa mekanisme formal Musrenbang belum mampu mengubah pola partisipasi masyarakat secara signifikan. Hasanawi et al. (2023) menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat dan tata kelola komunitas adalah faktor kunci keberhasilan pembangunan perkotaan, terutama pada penanganan kawasan kumuh. Sinamo (2024) mengindikasikan bahwa partisipasi tetap rendah meskipun program kolaboratif telah tersedia. Temuan Dewi, Tan & Nazer (2024) menegaskan bahwa pelibatan masyarakat yang tidak memadai dapat memicu penolakan terhadap rencana tata ruang. Sementara Hilmi, Sari & Maharani (2023) menekankan semakin pentingnya penelitian mengenai partisipasi masyarakat di kota-kota menengah di Indonesia.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan kunci: bagaimana kondisi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan di Kota Binjai, apa tantangan yang dihadapi, dan strategi penguatan apa yang perlu dilakukan agar perencanaan pembangunan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dengan demikian penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur partisipasi masyarakat pada konteks kota menengah, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kapasitas dan peran kecamatan sebagai unit pemerintahan terdekat dalam mewujudkan pembangunan yang kolaboratif, aspiratif, dan berkeadilan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Partisipasi Masyarakat

Dalam perspektif pembangunan kontemporer, partisipasi masyarakat diposisikan sebagai komponen fundamental bagi terwujudnya pembangunan yang demokratis dan berkelanjutan. Pemaknaan konsep ini mengalami transformasi seiring perkembangan kajian, dari keterlibatan pasif sebagai sekadar hadir dalam forum musyawarah menjadi keterlibatan aktif warga pada seluruh tahapan pembangunan—mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi (Fahmi, Sa'adih, & Hutauruk, 2020). Dengan demikian, partisipasi tidak lagi dipandang sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai instrumen substantif yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan. Hal ini sejalan dengan konsep *meaningful participation*, yaitu partisipasi yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pemantauan pelaksanaan program, serta evaluasi kebijakan pembangunan (Pamungkas, Sutrisno, & Yusuf, 2023).

Salah satu kerangka teoritis yang secara luas digunakan dalam mengkaji dinamika partisipasi ialah *ladder of citizen participation* oleh Arnstein (1969). Model ini mengelompokkan partisipasi ke dalam delapan tingkatan, dari manipulasi hingga kontrol penuh oleh masyarakat. Meskipun dikembangkan lebih dari lima puluh tahun lalu, kerangka tersebut masih relevan untuk membedakan antara partisipasi yang bersifat simbolik dengan partisipasi yang memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan publik. Penelitian mutakhir juga menegaskan bahwa kualitas partisipasi ditentukan oleh tingkat inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat tidak sekedar menjadi peserta melainkan aktor yang mampu mempengaruhi keputusan (Anshori, Maksum, & Darmajanti, 2023).

Dalam konteks pemerintahan daerah, partisipasi mengemban dua fungsi strategis. Pertama, memperkuat legitimasi dan akseptabilitas kebijakan publik. Kedua, mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam merumuskan prioritas pembangunan (Fahmi et al., 2020). Oleh karena itu, penguatan partisipasi harus dilakukan tidak hanya dengan menyediakan forum konsultasi, tetapi juga dengan meningkatkan kapasitas warga dan memperkuat kelembagaan pemerintahan secara kolaboratif. Landasan teoritis ini menjadi pijakan untuk menelusuri bagaimana partisipasi terwujud secara konkret pada level pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

2.2. Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam pembangunan yang mengedepankan prinsip demokrasi dan keberlanjutan. Secara konseptual, partisipasi telah berkembang dari kehadiran fisik di forum diskusi menjadi bentuk keterlibatan aktif dalam keseluruhan siklus pembangunan—perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Fahmi et al., 2020). Partisipasi bermakna (*meaningful participation*) mensyaratkan bukan hanya kehadiran di forum formal, tetapi keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan serta fungsi pengawasan dan evaluasi kebijakan (Pamungkas et al., 2023).

Kerangka teoritik yang banyak dijadikan rujukan adalah tangga partisipasi Arnstein (1969) yang memetakan delapan tingkat keterlibatan, dari tingkat manipulasi hingga kontrol penuh warga atas kebijakan publik. Model ini masih valid dalam membedakan partisipasi yang bersifat simbolik dari partisipasi yang menghasilkan perubahan nyata dalam kebijakan. Penelitian baru menunjukkan bahwa partisipasi yang efektif harus menempatkan warga dalam proses pembangunan secara inklusif, transparan, dan akuntabel, sehingga masyarakat bukan hanya menjadi objek kebijakan, tetapi aktor yang berpengaruh terhadap keputusan (Anshori et al., 2023).

Dalam ranah pemerintahan lokal, partisipasi masyarakat memiliki peran ganda, yakni sebagai sarana legitimasi kebijakan dan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat (Fahmi

et al., 2020). Oleh karenanya, strategi peningkatan partisipasi harus mencakup peningkatan kapasitas masyarakat dan penyediaan mekanisme kelembagaan yang menjamin kolaborasi berkelanjutan antara warga dan pemerintah. Kerangka pemikiran ini menjadi titik awal untuk memahami praktik partisipasi di level kecamatan maupun kelurahan.

2.3. Partisipasi Masyarakat di Level Pemerintahan Daerah

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk: partisipasi formal dan informal. Partisipasi formal dilakukan melalui mekanisme pemerintah, terutama Musrembang tingkat kelurahan hingga kecamatan. Sementara itu, partisipasi informal berlangsung melalui aktivitas berbasis komunitas seperti forum warga, kelompok swadaya masyarakat, LSM, atau media sosial (Rafinzar, Marpaung, Khairunnisa, Adventy, & Permatasari, 2024).

Berbagai temuan empiris mengungkapkan bahwa partisipasi formal sering menghadapi sejumlah keterbatasan, antara lain dominasi aktor tertentu, minimnya keterlibatan kelompok marginal, serta terbatasnya ruang masyarakat untuk mempengaruhi keputusan akhir (Titon & Karunia, 2024). Sebaliknya, partisipasi informal lebih fleksibel dan dinamis, namun belum terintegrasi dengan prosedur perencanaan pemerintah sehingga daya pengaruhnya terhadap kebijakan relatif rendah (Maulan, Yanti, & Sukmawati, 2023).

Menurut Pamungkas et al. (2023), partisipasi yang benar-benar bermakna (substantif) harus melibatkan masyarakat dalam tiga tahap: identifikasi kebutuhan pada tahap perencanaan, keterlibatan dalam perumusan serta pemilihan prioritas pembangunan pada tahap pengambilan keputusan, dan penilaian efektivitas program pada tahap evaluasi. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa pada tingkat kecamatan, partisipasi warga kerap berhenti pada tahap konsultasi awal sehingga aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya tercermin dalam dokumen perencanaan pembangunan (Bangun & Sugiarto, 2025; Titon & Karunia, 2024). Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah lemahnya legitimasi kebijakan dan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan program pembangunan.

2.4. Tantangan Penguatan Partisipasi

Berbagai penelitian mengidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pertama, keterbatasan akses informasi dan rendahnya transparansi menghambat masyarakat dalam memberikan masukan berbasis kebutuhan yang akurat (Bangun & Sugiarto, 2025). Kedua, kapasitas masyarakat dan literasi publik yang masih rendah, baik dari sisi pemahaman mekanisme perencanaan, pengetahuan regulasi, maupun kemampuan berorganisasi (Fahmi et al., 2020). Ketiga, dukungan institusional pemerintah, khususnya kesiapan aparatur dalam menciptakan forum partisipatif yang inklusif dan responsif (Anshori et al., 2023).

Faktor budaya birokrasi top-down juga berkontribusi terhadap minimnya ruang partisipasi. Titon dan Karunia (2024) menemukan bahwa model birokrasi yang hirarkis mendorong partisipasi bersifat simbolik karena keputusan pembangunan tetap didominasi oleh pemerintah. Hambatan lain yang banyak ditemui ialah keterbatasan akses publik terhadap dokumen perencanaan, sehingga masyarakat tidak memiliki informasi memadai untuk berpartisipasi secara kritis (Bangun & Sugiarto, 2025).

Pemanfaatan teknologi digital membuka peluang baru bagi partisipasi melalui kanal *e-government*. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada pemerataan infrastruktur digital dan tingkat literasi teknologi masyarakat (Maulan et al., 2023; Rafinzar et al., 2024). Di sisi lain, partisipasi yang efektif memerlukan peningkatan kapasitas warga untuk memahami isu pembangunan dan menyampaikan aspirasi secara argumentatif (Susniwati, Kurniawati, & Susilawati, 2024), bersamaan dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah sebagai fasilitator dialog kebijakan (Taurista & Choiriyah, 2024).

Hambatan sosial-budaya juga turut mempengaruhi rendahnya partisipasi. Rafinzar et al. (2024) mencatat bahwa sebagian masyarakat kurang terdorong untuk terlibat aktif akibat rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, budaya konsultasi terbatas, dan dominasi elite lokal. Tantangan terakhir ialah lemahnya kelembagaan forum partisipatif yang bersifat episodik dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak membangun keterlibatan jangka panjang (Anshori et al., 2023).

2.5. Strategi Penguatan Partisipasi Masyarakat

Banyak literatur merekomendasikan penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan sebagai strategi awal penguatan partisipasi. Susniwati et al. (2024) menunjukkan bahwa pelatihan partisipatif dapat meningkatkan kemampuan warga dalam memahami masalah lokal dan menyusun prioritas pembangunan. Pembentukan kelompok kerja warga atau forum komunitas juga dapat mendorong keterlibatan kolektif dan memperluas representasi (Pamungkas et al., 2023).

Teknologi informasi dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat partisipasi melalui aplikasi pengaduan, survei digital, dan forum konsultasi virtual (Maulan et al., 2023; Rafinzar et al., 2024). Teknologi mampu memperluas jangkauan partisipasi, termasuk bagi warga yang tidak dapat hadir dalam forum fisik. Namun demikian, pendampingan digital tetap diperlukan agar seluruh kelompok masyarakat mampu memanfaatkan platform tersebut secara merata (Susniwati et al., 2024). Infrastruktur teknologi di tingkat kecamatan menjadi syarat penting keberhasilan strategi ini.

Strategi selanjutnya adalah memperkuat mekanisme forum formal seperti Musrenbang serta agenda dialog warga secara rutin. Titon dan Karunia (2024) menegaskan bahwa forum yang terjadwal, memiliki agenda substantif, dan menghasilkan dokumentasi transparan dapat meningkatkan kualitas partisipasi. Integrasi forum formal dan informal, misalnya melalui hybrid meetings, juga dinilai efektif untuk memperluas jangkauan partisipasi (Bangun & Sugiarto, 2025).

Konsep *collaborative governance* mendorong kemitraan pembangunan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Anshori et al., 2023). Pembentukan tim pengawas pembangunan berbasis komunitas, pelibatan LSM, dan penggunaan konsultan independen dapat meningkatkan transparansi proses perencanaan. Selain itu, strategi inklusi diperlukan untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak muda, dan masyarakat miskin memiliki akses penuh dalam proses perencanaan (Taurista & Choiriyah, 2024).

Koordinasi berlapis antara kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kota juga menjadi kunci agar aspirasi masyarakat tersalurkan secara vertikal hingga tahap penyusunan kebijakan strategis (Bangun & Sugiarto, 2025). Mekanisme umpan balik diperlukan untuk memastikan bahwa masukan masyarakat tidak berhenti pada tahap pengumpulan, tetapi diakomodasi dalam kebijakan (Pamungkas et al., 2023).

2.6. Kerangka Konseptual

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan prinsip penting tata kelola pemerintahan demokratis, terutama di tingkat kota dan kecamatan. Dalam perspektif ini, partisipasi tidak hanya berkaitan dengan kehadiran warga dalam mekanisme formal, tetapi dengan kemampuan masyarakat mempengaruhi keputusan publik dan arah pembangunan.

Hutagalung (2022) menegaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan arah, proses, dan hasil pembangunan di lingkungan mereka. Definisi ini menempatkan partisipasi dalam tiga dimensi utama: tingkat keterlibatan, pengaruh dalam pengambilan keputusan, serta kapasitas kolektif masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Kerangka *ladder of participation* telah banyak digunakan dalam kajian tata kelola, dan sejumlah peneliti mengadaptasinya sesuai konteks modern. Uddin dan Alam (2021) memperbarui konsep tersebut melalui model evaluatif berbasis dua indikator: *fairness*, keadilan dalam akses dan representasi partisipasi, serta *effectiveness*, seberapa besar masukan publik mempengaruhi keputusan pembangunan. Model ini memberikan penilaian yang lebih kontekstual terhadap dinamika partisipasi di kota-kota negara berkembang dan mengidentifikasi empat tingkatan partisipasi yang relevan pada level pemerintahan lokal.

Tabel 1. Tabel Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Tingkat	Karakteristik	Implikasi Perencanaan
1. Informasi (<i>Informing</i>)	Pemerintah memberikan informasi kepada publik tanpa ruang dialog.	Transparansi meningkat, tetapi masyarakat pasif.
2. Konsultasi (<i>Consultation</i>)	Masyarakat diminta pendapat melalui forum formal seperti Musrenbang.	Input ada, namun belum menjamin pengaruh terhadap keputusan.
3. Kolaborasi (<i>Collaboration</i>)	Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam perumusan program.	Meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.
4. Delegasi Kekuasaan (<i>Empowerment/ Delegation</i>)	Warga memiliki kewenangan bersama dalam pengambilan keputusan.	Partisipasi substantif, menciptakan pemberdayaan lokal.

Kerangka ini menekankan bahwa partisipasi bermakna (*meaningful participation*) terjadi ketika masyarakat berada pada level kolaborasi atau delegasi kekuasaan, di mana keputusan pembangunan tidak hanya dikonsultasikan tetapi juga dinegosiasikan bersama masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana masyarakat di tingkat kecamatan di Kota Binjai berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, tantangan yang mereka hadapi, serta strategi penguatan yang dapat diterapkan oleh kecamatan sebagai unit pemerintahan terdekat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, dinamika, dan konstruksi sosial dalam praktik perencanaan pembangunan melalui interpretasi terhadap data tekstual dan konteks kebijakan. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami sebuah fenomena “berdasarkan makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap masalah sosial tertentu”.

Metode deskriptif dipilih dengan tujuan menggambarkan realitas secara empiris tanpa memanipulasi variabel penelitian. Sejalan dengan Sandelowski (2000), penelitian deskriptif berorientasi pada penyajian fenomena “apa adanya, secara faktual dan mendetail”. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah di tingkat kecamatan, termasuk efektivitas saluran partisipatif, tingkat keterlibatan masyarakat dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan, serta kontribusi peran kecamatan dalam memastikan perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

3.2 Sumber Data dan Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu dokumen resmi kebijakan perencanaan pembangunan daerah maupun publikasi akademik relevan. Bowen (2009) menyatakan bahwa dokumen kebijakan merupakan “sumber penting untuk memahami konteks kelembagaan, proses administratif, serta argumentasi normatif dalam perumusan kebijakan” (hlm. 29). Dokumen yang dianalisis meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai, Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah di tingkat kecamatan, Rencana Kerja Tahunan (RENJA) kecamatan.

Unit analisis penelitian adalah proses perencanaan pembangunan daerah di tingkat kecamatan, yang mencakup alur penyusunan rencana, integrasi aspirasi masyarakat, serta strategi pemberdayaan masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan.

3.3 Prosedur Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap arsip digital maupun dokumen fisik melalui basis data pemerintah daerah, perpustakaan daerah, dan pusat data kebijakan publik. Bowen (2009) menjelaskan bahwa studi dokumentasi merupakan pendekatan sistematis untuk “meninjau dan mengevaluasi dokumen sebagai bagian dari proses penelitian kualitatif”.

Langkah-langkah studi dokumentasi adalah dengan melakukan identifikasi dokumen berdasarkan tingkat kebijakan dan tahun penerbitan, seleksi dokumen sesuai kriteria inklusi, yakni memuat pembahasan partisipasi masyarakat dan aspek kepemimpinan politik, kategorisasi dokumen ke dalam kelompok RPJPD, RPJMD, RENSTRA, dan RENJA, serta ekstraksi data melalui pembacaan mendalam untuk mengidentifikasi bagian teks terkait indikator partisipasi masyarakat, hambatan implementasi, dan strategi penguatan kecamatan. Prosedur dokumentasi dilakukan secara berulang untuk menjamin kelengkapan data dan meminimalkan bias seleksi.

3.4 Teknik Analisis Isi Kualitatif

Analisis data menggunakan Analisis Isi (*Content Analysis*) kualitatif untuk mengidentifikasi tema, kategori, dan pola makna dalam dokumen kebijakan. Menurut Krippendorff (2019), analisis isi merupakan teknik penelitian untuk “membuat inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari data teks ke konteks penggunaannya”.

Tahapan analisis dilakukan sebagai berikut. Pertama, Koding terbuka (*open coding*): Mengidentifikasi dan memberi kode pada konsep, istilah, dan frasa utama terkait partisipasi masyarakat berdasarkan kerangka *Ladder of Participation*. Arnstein (1969) mengelompokkan partisipasi ke dalam delapan tingkat, dari *manipulation* hingga *citizen control*, sebagai indikator kualitas partisipasi warga dalam proses kebijakan. Kedua, pembentukan kategori yaitu mengelompokkan kode menjadi kategori konseptual seperti: bentuk partisipasi masyarakat, hambatan struktural dan teknis, peran dan kapasitas kecamatan, strategi penguatan partisipasi. Ketiga, interpretasi mendalam yaitu menyusun deskripsi naratif mengenai pola partisipasi masyarakat, tantangan implementasi, dan strategi peningkatan efektivitas partisipasi di tingkat kecamatan.

Pendekatan ini memastikan pemaknaan temuan secara sistematis dan kontekstual untuk mengungkap dinamika kebijakan dan praktik pemerintahan daerah.

3.5 Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan narasi, indikator kebijakan, dan temuan analisis antar dokumen RPJPD, RPJMD, RENSTRA, dan RENJA. Lincoln dan Guba (1985) menegaskan bahwa triangulasi meningkatkan kredibilitas karena memungkinkan verifikasi sumber data untuk menghindari bias interpretasi.

Selain triangulasi, penelitian menerapkan audit trail, yaitu pencatatan seluruh proses analisis secara sistematis, mulai dari koding, pembentukan kategori, hingga interpretasi. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), audit trail “memungkinkan penelusuran ulang proses analitik sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah”.

3.6 Analisis Kualitatif

Untuk memastikan keteraturan proses analisis data dan transparansi metodologis, penelitian ini menguraikan tahapan analisis isi kualitatif ke dalam suatu alur kerja sistematis sebagaimana disajikan dalam Gambar 1. Alur analisis ini dirancang untuk menelusuri dan menginterpretasikan informasi yang terkandung dalam dokumen kebijakan secara mendalam, sehingga mampu mengungkap pola representasi partisipasi masyarakat dalam mekanisme perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.

Proses dimulai dengan identifikasi dan seleksi dokumen berdasarkan kriteria inklusi, yaitu dokumen yang secara eksplisit memuat pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dan konteks penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Setelah dokumen terkumpul, dilakukan pembacaan sistematis untuk mengekstraksi unit-unit makna relevan dari teks kebijakan. Unit makna tersebut kemudian dianalisis melalui tiga tahap utama: (1) koding terbuka, untuk mengidentifikasi konsep dan tema awal, termasuk elemen tingkat partisipasi berdasarkan kerangka *Ladder of Participation*; (2) pembentukan kategori, yakni pengelompokan tema ke dalam struktur konseptual yang lebih komprehensif; dan (3) interpretasi mendalam untuk membangun pemahaman naratif mengenai relasi tema dalam konteks penelitian.

Flowchart ini menggambarkan tahapan analisis isi kualitatif yang digunakan dalam penelitian, dimulai dari identifikasi dan seleksi dokumen hingga proses koding, pembentukan kategori, interpretasi mendalam, triangulasi sumber, dan perumusan temuan penelitian. Seluruh tahapan tersebut disertai dengan triangulasi sumber melalui perbandingan lintas dokumen RPJPD, RPJMD, RENSTRA, dan RENJA untuk meningkatkan keabsahan interpretasi. Tahap akhir analisis berupa penyusunan temuan penelitian dan deskripsi naratif sebagai dasar pembahasan pada bab hasil. Dengan demikian, alur analisis ini memastikan bahwa proses interpretasi data berlangsung secara sistematis, dapat ditelusuri kembali, dan memenuhi prinsip metodologis dalam penelitian kualitatif.

4. HASIL DAN ANALISIS TEMUAN PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Proses Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan

Proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan di Kota Binjai mengacu pada kerangka regulatif RPJPD, RPJMD, serta dokumen RENSTRA dan RENJA setiap perangkat daerah. Kecamatan berfungsi sebagai simpul koordinatif yang menghubungkan kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan dengan prioritas pembangunan pemerintah kota. Musrenbang Kecamatan menjadi kanal utama penyampaian aspirasi masyarakat yang dirumuskan secara berjenjang dari Forum Konsultasi Kelurahan.

Analisis dokumen menunjukkan bahwa struktur perencanaan telah didesain bersifat partisipatif, dengan kecamatan berperan sebagai fasilitator alur usulan dan harmonisasi prioritas program. Namun, efektivitas saluran partisipatif tidak seragam antar kecamatan. Kualitas forum Musrenbang bergantung pada kapasitas koordinasi aparatur, ketersediaan data kebutuhan lokal, serta tingkat keterlibatan pemangku kepentingan masyarakat.

Sementara perangkat regulatif mencerminkan komitmen partisipasi publik, implementasi belum sepenuhnya menghasilkan interaksi deliberatif antara warga, pemangku kepentingan, dan pemerintah kecamatan. Hal ini dapat diamati dari rendahnya kualitas dokumentasi tindak lanjut usulan, serta belum adanya mekanisme umpan balik resmi ke masyarakat setelah Musrenbang.

4.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Hasil analisis menggunakan kerangka *Ladder of Participation* versi adaptasi Uddin & Alam (2021) menunjukkan empat bentuk partisipasi yang terjadi pada tingkat kecamatan:

Tabel 2. Bentuk Partisipasi Kecamatan

Bentuk Partisipasi	Manifestasi di Kecamatan	Tingkat pada Ladder
Pemberian Informasi	Sosialisasi agenda Musrenbang melalui surat undangan & media sosial	<i>Informing</i>
Konsultasi	Warga menyampaikan usulan di forum Musrenbang, FKPM, atau forum kelurahan	<i>Consultation</i>
Kolaborasi	Kolaborasi parsial pada program berbasis komunitas (kebersihan lingkungan, pemberdayaan, kampung tematik)	<i>Collaboration</i>
Delegasi Kekuasaan	Tidak ditemukan dalam keseluruhan dokumen perencanaan	<i>Empowerment</i> (belum terjadi)

Berdasarkan pemetaan tersebut, partisipasi masyarakat masih berada pada tingkatan konsultasi, dengan kecenderungan meningkat menuju kolaborasi pada beberapa program tematik berbasis komunitas. Namun, masyarakat belum memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan atas prioritas pembangunan, sehingga partisipasi substantif (*empowerment*) belum tercapai.

4.3 Tantangan Implementasi Partisipasi Masyarakat

Analisis dokumen mengungkap lima kelompok tantangan utama yang menghambat terwujudnya partisipasi bermakna dalam perencanaan pembangunan kecamatan:

Tabel 3. Tantangan Implementasi Partisipasi Masyarakat

Kategori Tantangan	Deskripsi Temuan	Dampak Partisipasi
Akses Informasi	Jadwal Musrenbang & draf prioritas tidak tersedia terbuka	Warga tidak siap secara substansial
Kapasitas Masyarakat	Rendahnya literasi perencanaan & kemampuan merumuskan usulan	Usulan tidak spesifik & sulit diharmonisasi
Kelembagaan Musrenbang	Forum episodik, minim umpan balik, dokumentasi tidak rinci	Menurunkan akuntabilitas & kepercayaan publik
Budaya Birokrasi	Keputusan dominan dari pemerintah, diskusi deliberatif lemah	Partisipasi bersifat simbolik
Infrastruktur Digital	Partisipasi daring belum merata, fasilitasi minim	Menghambat perluasan partisipasi

Realitas di atas menunjukkan bahwa hambatan bersifat struktural sekaligus kultural, sehingga solusi tidak cukup hanya melalui penyediaan forum partisipatif, tetapi membutuhkan intervensi peningkatan kapasitas dan reformasi tata kelola partisipasi.

4.4 Peran Kecamatan dalam Memfasilitasi Partisipasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kecamatan menjadi faktor penentu dalam kualitas partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan. Meskipun mekanisme formal Musrenbang tersedia secara seragam di seluruh wilayah Kota Binjai, tingkat partisipasi masyarakat yang muncul ternyata sangat bergantung pada bagaimana kecamatan menjalankan fungsi fasilitatifnya. Data memperlihatkan bahwa kecamatan dengan kapasitas kelembagaan yang lebih kuat mampu menciptakan proses perencanaan yang lebih inklusif, reflektif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada hasil.

Efektivitas partisipasi antar kecamatan tampak beragam dan dipengaruhi oleh beberapa elemen kunci. Pertama, kapasitas sumber daya manusia kecamatan dalam memfasilitasi dialog publik menentukan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Kedua, adanya inovasi pelayanan publik berbasis komunitas berkontribusi pada meningkatnya kedekatan pemerintah dengan warga. Ketiga, kemampuan kecamatan dalam mengelola data kebutuhan lokal membuat perencanaan menjadi lebih terarah. Keempat, konektivitas antar pelaku termasuk kelurahan, perangkat daerah, serta organisasi masyarakat berperan signifikan dalam memastikan proses perencanaan berjalan lintas sektor dan lintas kepentingan.

Ciri-ciri kecamatan yang menunjukkan kinerja partisipasi lebih unggul dapat dilihat pada pola kerja yang lebih kolaboratif dan proaktif. Kecamatan tersebut secara rutin menyelenggarakan forum konsultasi terbuka sebelum Musrenbang, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk membahas isu prioritas. Selain itu, mereka membangun kemitraan dengan LSM, komunitas lokal, serta tokoh masyarakat untuk menguatkan kanal partisipasi di luar forum formal. Kecamatan berkinerja baik juga menyusun ringkasan hasil Musrenbang dan menginformasikan tindak lanjutnya kepada masyarakat, sehingga menciptakan transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses pembangunan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa kecamatan tidak dapat diposisikan hanya sebagai penyelenggara teknis Musrenbang, melainkan sebagai aktor kunci dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat. Ketika kecamatan menjalankan fungsi sebagai fasilitator kolaborasi, pengelola pengetahuan lokal, dan penghubung antara pemerintah kota dengan warga, proses perencanaan menjadi lebih demokratis dan responsif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan kecamatan layak dipandang sebagai strategi sentral untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

4.5 Strategi Penguatan Peran Kecamatan dalam Mendorong Partisipasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kecamatan menjadi faktor penentu dalam kualitas partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan. Meskipun mekanisme formal Musrenbang tersedia secara seragam di seluruh wilayah Kota Binjai, tingkat partisipasi masyarakat yang muncul ternyata sangat bergantung pada bagaimana kecamatan menjalankan fungsi fasilitatifnya. Data memperlihatkan bahwa kecamatan dengan kapasitas kelembagaan yang lebih kuat mampu menciptakan proses perencanaan yang lebih inklusif, reflektif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada hasil.

Efektivitas partisipasi antar kecamatan tampak beragam dan dipengaruhi oleh beberapa elemen kunci. Pertama, kapasitas sumber daya manusia kecamatan dalam memfasilitasi dialog publik menentukan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Kedua, adanya inovasi pelayanan publik berbasis komunitas berkontribusi pada meningkatnya kedekatan pemerintah dengan warga. Ketiga, kemampuan kecamatan dalam

mengelola data kebutuhan lokal membuat perencanaan menjadi lebih terarah. Keempat, konektivitas antar pelaku, termasuk kelurahan, perangkat daerah, serta organisasi masyarakat yang berperan signifikan dalam memastikan proses perencanaan berjalan lintas sektor dan lintas kepentingan.

Ciri-ciri kecamatan yang menunjukkan kinerja partisipasi lebih unggul dapat dilihat pada pola kerja yang lebih kolaboratif dan proaktif. Kecamatan tersebut secara rutin menyelenggarakan forum konsultasi terbuka sebelum Musrenbang, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk membahas isu prioritas. Selain itu, mereka membangun kemitraan dengan LSM, komunitas lokal, serta tokoh masyarakat untuk menguatkan kanal partisipasi di luar forum formal. Kecamatan berkinerja baik juga menyusun ringkasan hasil Musrenbang dan menginformasikan tindak lanjutnya kepada masyarakat, sehingga menciptakan transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses pembangunan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa kecamatan tidak dapat diposisikan hanya sebagai penyelenggara teknis Musrenbang, melainkan sebagai aktor kunci dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat. Ketika kecamatan menjalankan fungsi sebagai fasilitator kolaborasi, pengelola pengetahuan lokal, dan penghubung antara pemerintah kota dengan warga, proses perencanaan menjadi lebih demokratis dan responsif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan kecamatan layak dipandang sebagai strategi sentral untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa model partisipasi masyarakat pada tingkat kecamatan di Kota Binjai telah terlembagakan namun belum teraktivasi secara optimal, di mana regulasi dan forum telah tersedia tetapi pelibatan masyarakat masih berorientasi pada input semata, bukan pada keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi hanya akan bermakna apabila masyarakat memiliki kapasitas menyampaikan aspirasi berbasis kebutuhan, kecamatan berperan sebagai fasilitator deliberasi, informasi dan dokumen perencanaan dibuka secara transparan, serta tersedia mekanisme umpan balik dan penilaian publik terhadap keputusan pembangunan. Dengan demikian, transformasi partisipasi memerlukan sinergi antara pemberdayaan warga dan pembenahan tata kelola pemerintahan kecamatan, sehingga peningkatan kualitas partisipasi tidak berhenti pada penyelenggaraan forum partisipatif tetapi berlanjut pada praktik kolaboratif dalam menentukan arah pembangunan.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan di Kota Binjai, tantangan yang dihadapi, serta strategi penguatan agar proses perencanaan menjadi lebih inklusif. Berdasarkan hasil analisis dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja) menggunakan analisis isi kualitatif, diperoleh beberapa kesimpulan berikut:

1. Tingkat partisipasi masyarakat masih berada pada kategori konsultatif, belum mencapai bentuk kemitraan atau pengaruh langsung dalam pengambilan keputusan. Meskipun mekanisme Musrenbang tersedia secara formal, ruang keterlibatan masyarakat lebih bersifat penyampaian aspirasi, bukan perumusan bersama kebijakan pembangunan.
2. Keterlibatan masyarakat belum merata secara sektoral maupun kewilayahan. Kelompok-kelompok seperti komunitas perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan organisasi profesi masih kurang terwakili dalam penyusunan rencana pembangunan kecamatan.
3. Tantangan utama partisipasi berada pada tiga dimensi: a) Struktural, sentralisasi pengambilan keputusan di tingkat kota membatasi peran kecamatan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan warga; b) Proses, forum perencanaan belum

sepenuhnya berbasis kebutuhan lokal dan sering dipengaruhi politisasi aspirasi; c) Kapasitas masyarakat, minimnya literasi perencanaan menyebabkan masyarakat tidak percaya diri dalam mengusulkan program.

4. Kecamatan memiliki peran strategis sebagai simpul penguatan partisipasi masyarakat, karena berada paling dekat dengan warga dan memiliki kapasitas koordinasi antar-lingkungan/kelurahan. Namun, peran ini belum termanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan sumber daya, kewenangan, dan mekanisme kolaborasi antar pelaku pembangunan.
5. Penguatan partisipasi masyarakat memerlukan transformasi dari pendekatan administratif menjadi pendekatan kolaboratif, di mana kecamatan bertindak sebagai fasilitator dialog pembangunan lokal yang menempatkan masyarakat sebagai mitra perencanaan, bukan sebagai penerima program.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, maka direkomendasikan beberapa langkah strategis penguatan partisipasi masyarakat di tingkat kecamatan sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan. Pemerintah Kota Binjai perlu mendelegasikan kewenangan perencanaan mikro kepada kecamatan untuk memperkuat posisi kecamatan dalam menetapkan prioritas pembangunan wilayah, sekaligus mengintegrasikan indikator partisipasi masyarakat ke dalam sistem evaluasi pembangunan daerah agar partisipasi tidak berhenti sebagai formalitas Musrenbang.
2. Rekomendasi Kelembagaan. Kecamatan perlu membentuk Forum Kolaborasi Perencanaan Wilayah (FKPW) yang beranggotakan organisasi masyarakat, tokoh komunitas, akademisi, pelaku usaha, dan pemuda untuk merumuskan program strategis tahunan, disertai peningkatan kapasitas ASN kecamatan dalam fasilitasi dialog partisipatif, perancangan program berbasis bukti, dan manajemen kolaborasi multipihak.
3. Rekomendasi Pemberdayaan Masyarakat. Perlu diselenggarakan Sekolah Partisipasi Pembangunan di tingkat kecamatan guna meningkatkan literasi perencanaan bagi warga terutama kelompok rentan serta penyediaan media digital Musrenbang Kecamatan yang memungkinkan masyarakat mengakses dokumen perencanaan, menyampaikan aspirasi, dan memantau capaian pembangunan secara transparan.
4. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya. Studi berikutnya disarankan mengkombinasikan metode dokumentasi dan wawancara mendalam agar dinamika sosial-politik perencanaan dapat tergambarkan lebih komprehensif, serta melakukan studi komparatif antardaerah untuk mengidentifikasi model terbaik penguatan partisipasi masyarakat pada tingkat kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA Sumut. (2024, Februari 27). *Wali Kota Binjai buka Musrenbang RKPD 2024: Dorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah*. ANTARA News Sumatera Utara. <https://sumut.antaranews.com/>
- Adhanani, R. A. N. (2019). *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan teritorial (Studi komparasi: Borobudur dan Nantes)*. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 15(4), 233–245. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/6674>

- Dewi, L. S., Tan, F., & Nazer, M. (2024). *Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang Kota Bukittinggi*. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 19(2), 87–99. <https://jurnal.uns.ac.id/region/article/view/39852>
- Hasanawi, A., Hasanawi, I., & Hasanawi, D. (2023). *Improvement of community governance to support slum upgrading programs in Indonesia*. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 3(3), 150–162. <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/view/88>
- Hilmi, Z., Sari, M., & Maharani, L. (2023). *Mapping the literature on community participation in urban infrastructure development: A bibliometric analysis*. *Jurnal Infrastruktur Pancasila*, 4(1), 25–38. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/infrastruktur/article/view/6445>
- Putra, M. A. (2023). *Implementasi prinsip partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah: Antara idealisme dan realitas*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 10(2), 145–160. <https://doi.org/10.xxxx/jipkp.v10i2.2023>
- Sinamo, H. (2024). *Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Kangkung, Kota Bandar Lampung*. *Jurnal Plano Buana*, 2(2), 65–77. https://jurnal.unipasby.ac.id/jurnal_plano_buana/article/view/5300
- Taurista, R. A., & Choiriyah, I. U. (2024). *Community participation in development planning is driven by leadership, communication, and education*. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3), 101–110. <https://ijccd.umsida.ac.id/index.php/ijccd/article/view/1080>
- Anshori, A., Maksum, I. R., & Darmajanti, L. (2023). *The challenges of enhancing participation in urban community empowerment: Evidence from four villages in Jakarta*. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*. <https://doi.org/10.22146/jkap.25061>
- Bangun, I., & Sugiarto, A. (2025). *Evaluation of Public Involvement in the Formulation of Local Government Work Plans in Langkat Regency*. *International Conference Of Digital Sciences And Engineering Technology*, 52–60. Retrieved from <https://proceeding.pancabudi.ac.id/index.php/ICDSET/article/view/311>
- Fahmi, A., Sa'adih, S., & Hutauruk, R. P. (2020). *Public participation in local governance: A case study of development planning in East Jakarta*. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains*. <https://doi.org/10.24967/jshs.v7i2.4306>
- Maulan, R. Y., Yanti, O., & Sukmawati, N. (2023). *Smart governance as a new strategy on Jambi city policy innovations*. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1747–1757. <https://doi.org/10.29210/0202312922>
- Pamungkas, B., Sutrisno, E., & Yusuf, M. (2023). *Initiating the implementation of meaningful public participation in forming regulations in urban areas: From the perspective of smart urban governance*. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(3). <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i3.29284>

- Rafinzar, R., Marpaung, Z. S., Khairunnisa, T., Adventy, M. I. Y., & Permatasari, I. (2024). *Community participation and policy effectiveness in urban flood mitigation: Evidence from Palembang City, Indonesia*. Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan, 8(1). <https://doi.org/10.24905/igj.v8i1.147>
- Susniwati, S., Kurniawati, K., & Susilawati, S. (2024). *Public policy innovation in Indonesia: Enhancing citizen engagement through e-government initiatives*. PINISI Discretion Review, 8(1). <https://doi.org/10.26858/pdr.v8i1.66364>
- Taurista, H., & Choiriyah, I. U. (2024). *Community participation in development planning is driven by leadership, communication, and education*. Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 15(3). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1080>
- Titon, R., & Karunia, L. (2024). *Perencanaan partisipatif pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang*. Jurnal Good Governance, 14(2). <https://doi.org/10.32834/jgg.v14i2.13>
- Uddin, K., & Alam, B. M. (2021). *Public Participation Process in Urban Planning: Evaluation Approaches of Fairness and Effectiveness Criteria of Planning Advisory Committees*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781003122111/public-participation-process-urban-planning-kamal-uddin-bhuiyan-monwar-alam>
- Hutagalung, S. S. (2022). *Buku Ajar: Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik*. CV. Literasi Nusantara Abadi. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK46081/buku-ajar-partisipasi-dan-pemberdayaan-di-sektor-publik>
- Arnstein, S. R. (1969). *A ladder of citizen participation*. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bowen, G. A. (2009). *Document analysis as a qualitative research method*. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. SAGE Publications. Akses: <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.)*. SAGE Publications. Akses: <https://us.sagepub.com/en-us/nam/content-analysis/book269662>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications. Akses: <https://us.sagepub.com/en-us/nam/naturalistic-inquiry/book842>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications. Akses: <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book239534>
- Sandelowski, M. (2000). *Whatever happened to qualitative description? Research in Nursing & Health*, 23(4), 334–340. [https://doi.org/10.1002/1098-240X\(200008\)23:4](https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4)